

Nomor : IM.02.03/C/2057/2024
Lampiran : Satu lembar
Hal : Pemberitahuan Lanjutan Pelaksanaan PIN Polio

1 Agustus 2024

Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan 33 Provinsi Pelaksana PIN Polio
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di 33 Provinsi Pelaksana PIN Polio

Menindaklanjuti hasil Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan PIN Polio pada tanggal 2 Agustus 2024 yang lalu, diketahui bahwa cakupan PIN Polio di Tanah Papua memasuki hari ke-67 baru mencapai 52,5% (dosis 1) dan 30,8% (dosis 2), sedangkan di 27 provinsi lainnya sampai hari ke-10 mencapai 81,7% (dosis 1). Sehubungan dengan itu, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh Dinas Kesehatan 33 provinsi dan kabupaten/kota di 33 provinsi agar segera melaksanakan upaya percepatan capaian PIN Polio:
 - a. Bagi daerah dengan cakupan $\geq 95\%$, lakukan validasi data per puskesmas (cakupan dan penggunaan vaksin), monitoring bersama dengan perangkat daerah dan *stakeholder* lainnya, serta RCA *intra campaign* untuk memastikan tidak ada anak terlewat diimunisasi.
 - b. Bagi daerah dengan cakupan 90 - <95%, lakukan pendataan/identifikasi sasaran yang belum mendapatkan imunisasi polio, monitoring bersama dengan perangkat daerah dan *stakeholder* lainnya serta validasi data dan RCA di puskesmas yang menyatakan telah selesai PIN polio.
 - c. Bagi daerah dengan cakupan <90%, lakukan pendataan/identifikasi sasaran yang belum mendapatkan imunisasi polio, kunjungan *door to door* ('menjemput bola'), optimalisasi penggerakan sasaran melibatkan kader, tokoh agama/adat, relawan PMI/Poltekkes, dan perangkat daerah setempat maupun TNI/POLRI, penyiapan pos-pos PIN di lokasi-lokasi strategis yang dekat dengan komunitas masyarakat, monitoring bersama dengan perangkat daerah dan *stakeholder* lainnya. Lakukan RCA di puskesmas yang menyatakan telah selesai PIN Polio (dengan menggunakan sasaran berdasarkan data riil/setempat).
2. Dengan mempertimbangkan rekomendasi WHO bahwa sebelum memulai pemberian dosis kedua nOPV2 harus dipastikan cakupan dosis 1 tinggi dan merata di seluruh wilayah serta kebijakan interval pemberian antar dosis nOPV2 yaitu 2–4 minggu, maka


pemberian dosis kedua nOPV2 di 27 provinsi pelaksana PIN Polio Tahap 2 ditunda menjadi 12 Agustus 2024. Dinas kesehatan diharapkan juga dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk melakukan optimalisasi persiapan serta *update microplaning* untuk pemberian dosis kedua.

3. Mengingat bulan Agustus merupakan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), kami sampaikan bahwa nOPV2 maupun bOPV aman untuk diberikan bersamaan dengan Campak-Rubela.

Demikian disampaikan, mohon agar Saudara beserta seluruh jajaran dapat menindaklanjutinya dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,



dr. Yudi Pramono, MARS
NIP. 19760392006041001

Lampiran Surat

Nomor : IM.02.03/C/ **2057** /2024

Tanggal : 1 Agustus 2024

DAFTAR ALAMAT SURAT

- 1 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
- 2 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
- 3 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
- 4 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
- 5 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
- 6 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- 7 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
- 8 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung
- 9 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
- 10 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 11 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi D.I Yogyakarta
- 12 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
- 13 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 14 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 15 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
- 16 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
- 17 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
- 18 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
- 19 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
- 20 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
- 21 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
- 22 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
- 23 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
- 24 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
- 25 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
- 26 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
- 27 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
- 28 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua
- 29 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
- 30 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya
- 31 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah
- 32 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan
- 33 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan